	Nomor SOP	481.6/465.2.14		
	Tanggal Pembuatan	10 Maret 2025		
	Tanggal Revisi	-		
	Tanggal Pengesahan	10 Maret 2025		
	Disahkan Oleh :	Kepala Dispermades		
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P. NIP. 19720620/199203 1 002		
	Judul SOP	SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	4 ODEKWI TA		
1. UU14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1. Memiliki pengetahuan tentang tata cara pelayanan informasi public			
2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14	2. Berkompeten dalam bidang teknologi dan informasi			
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	3. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan bidang/seksi terkait			
3. Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;	untuk Menyusun into	ormasi yang akan dipublikasikan		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapa	n		
1. SOP Pelayanan Permintaan Informasi Publik	1. Media Komunikasi (t	elepon, website, media sosial, fax, sms, surat, tatap		
2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik	muka)			
3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	2. Komputer dengan jaringan internet			
	3. Alat Tulis Kantor			
Peringatan	Pencatatan dan Penda			
Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat kelancaran tugas PPID dalam pelayanan informasi	mengisi formulir pe diri.	anan pelayanan informasi, pemohon informasi wajib rmohonan informasi dan menyertakan bukti identitas		
	2. Data / dokumen dis	simpan sebagai data elektronik dan manual		

PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

NO	Uraian Prosedur	NFORMASI PUBLIK PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		PPID/ PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Pemohon	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan Informasi.	Mulai			Berkas permohonan informasi Setiap saat/dokumen dari pemohonan informasi atau Form permohoan infomasi atau aplikasi permohonan informasi(apik.kar anganyarkab,go.id)	Setiap saat		bisa dilakukan ketika:  1. Sebelum adanya permohonan imormasi PUDIK, Informasi Publik:  2. Pada saat adanya permphonar permonon Informasi Publik atau  3. Pada saat penyelesaian sengketa informasi public atas perintah majelis komsioner
2	Memberikan pertimbangan/ Uji Konsekuensi atas informasi /dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum.				Dasar hukum :UU 14 Tahun 2008 tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki 1 Tahun 2021 Berkas permohonan yang telah dilengkapi oleh scan identitas dini (NIK	Kerja	Surat keputusan Tim pertimbang an pelayanan Informasi	



3	Menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud jika status intormasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan pelayanan Informasi dinyatakan rahasia kepada PPID/PPID Pelaksana			Informasi/dokume n yang yang telah dinyatakan terbuka untuk publidisetujui dan di tetapkan	Hari Jam kerja, maksimal O hari setelah permohonan terregistrasi (sesuai UU No 14 Th 2008)	Informasi atau dokumen dari perangkat daerah	
	Memberikan informasi yang diminta kepada pemohon apabila informasi tersebut merupakan informasi yang bisa diakses oleh publik			Informasi/dokume n yang diminta oleh pemohon informas	Masih diberikan perpanjanga n pemenuhan informasi selama 7 (ujuh) hari sejak pemberitahu an tertulis diberikan dan tertulis diberikan dan tidak dapa diperpanjang lagi	Informasi public yang diminta oleh pemohon informasi	
	Memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia			Berkas surat penolakan disertai SK Informasi yang Dikecualikan	Hari Jam kerja,	Surat penolakan	
	Berkas diterima Pemohon		Selesai	informasi atau	Hari Jam kerja, maksimal 10 hari setelah pemohonan	Informasi public yang diminta oleh pemohon	

nenolakan diserta terregistrasi informasi
Berkas surat (sesuai UU atau surat
penolakan disertai No 14 Yh penolakan
SK Informasi yang 2008
Dikecualika